# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penjelasan teori yang berhubungan dengan tema penelitian yang bersumber dari literatur (pustaka).

## 2.1 Migrasi Penduduk

Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat nonpermanen (sementara) misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen (menetap). Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Mantra (1980) menambahkan bahwa migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Migrasi Nasional atau Internal, yaitu perpindahan penduduk di dalam satu negara. Migrasi nasional atau internal terdiri atas beberapa jenis, sebagai berikut :

- Urbanisasi yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap.
- Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah republik Indonesia. Transmigrasi pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1905 oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. Berdasarkan pelaksanaannya, transmigrasi di Indonesia dapat dibedakan atas :
    - Transmigrasi Umum, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah
    - Transmigrasi Khusus, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan degan tujuan tertentu, seperti penduduk yang terkena bencana alam dan daerah yang terkena pembangunan proyek
    - Transmigrasi Spontan (swakarsa), yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang atas kemauan dan biaya sendiri
    - Transmigrasi Lokal yaitu transmigrasi dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam propinsi atau pulau yang sama

- Ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi.

Selain jenis migrasi yang disebutkan di atas, terdapat jenis migrasi yang disebut evakuasi. Evakuasi adalah perpindahan penduduk yang terjadi karena adanya ancaman akibat bahaya perang, bencana alam dan sebagainya. Evakuasi dapat bersifat nasional maupun internasional.

## 2.2 Permukiman Transmigrasi

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Menpera, 2011). Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan, sedangkan lingkungan hunian terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman (Menpera, 2011).

Menurut UU ketransmigrasian permukiman transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang di peruntukan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran. Lokasi permukiman transmigrasi di tetapkan untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah dan/atau pusat pertumbuhan wilayah yang sedang berkembang.

## 2.3 Tata Guna Lahan Pedesaan

Menurut Jayadinata (1999) tata guna lahan adalah pengaturan penggunaan lahan yang dalam penggunaannya meliputi penggunaan permukaan bumi di daratan dan penggunaan permukan bumi di lautan. Jayadinata menambahkan bahwa tata guna lahan dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan di suata kawasan dengan meliputi pembagian fungsi-fungsi wilayah tertentu, misalnya fungsi permukiman, fungsi peerdagangan dan lain-lain. Penggunaan lahan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yakni:

- *Nilai keuntungan*, dihubungkan dengan tujuan ekonomi yang dapat dicapai dengan jual-beli lahan di pasaran bebas;
- *Nilai kepentingan umum*, berhubungan dengan pengaturan untuk masyarakat umum dalam perbaikan kehidupan masyarakat;

- *Nilai sosial*, merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan misalnya sebidang lahan yang dipelihara, pusaka, peninggalan dan sebagainya) dan yang dinyatakan oleh penduduk dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan, dan sebagainya.

Jayadinata (1999) juga menambahkan bahwa tanah di pedesaan digunakan bagi kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Kehidupan sosial, seperti berkeluarga, bersekolah, beribadat, berekreasi, berolahraga, dan sebagainya, dilakukan di dalam kampung, dan kegiatan ekonomi seperti bertani, berkebun, beternak, memelihara/menangkap ikan, menebang kayu di hutan dan sebagainya, umumnya dilakukan di luar kampung, walaupun ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan didalam kampung, seperti industri kecil, perdagangan, dan jasa-jasa lain misalnya: guru, bidan, pegawai koperasi, dan lain-lain. Jadi, penggunaan tanah di wilayah pedesaan adalah untuk perkampungan dalam rangka kegiatan sosial, dan untuk pertanian dalam rangka kegiatan ekonomi.

### 2.4 Transmigrasi

Menurut undang-undang RI nomor 15 tahun 1997 transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap diwilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah. Sedangkan wilayah pengembangan transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pemukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (UU Ketransmigrasian Nomor 15 tahun 1997).

### 2.5 Tematik

Tematik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang bersangkutan dengan tema, penggunaan kata tematik seringkali digunakan untuk suatu tempat atau objek yang mempunyai tema tersendiri. Sebagai contoh penggunaan kata tematik yaitu walikota bandung Ridwan Kamil mencanangkan taman tematik di beberapa titik di kota bandung untuk merevitalisasi taman-taman tersebut wisatabandung.com (2015). Sehingga dengan menggunakan suatu tema tertentu atau tematik pada taman-taman tersebut masyarakat menjadi lebih gampang mengingat *high awareness* dan masyarakat menjadi lebih senang berkunjung untuk melepas lelah dari hiruk pikuk perkotaan atau sekedar berekreasi karena taman-taman tersebut mempunyai daya tarik tersendiri pada tema yang telah ditetapkan.

## 2.6 Regional Branding

Regional branding merupakan suatu strategi dalam penguatan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Dengan memberikan brand pada suatu wilayah aktivitas perekonomian pada wilayah tersebut akan meningkat. Menurut artikel ekonomi yfactorblog.com (2015) "*When communities embark on regionomic marketing the first challenge is what to name the region and how to brand the region. Branding is a basic necessity as marketing strategies, tactics and campaigns cannot be executed without it. If a region doesn't already have a name, choosing one that will please everybody is difficult. Which of the many assets or geographic aspects or pre-existing community names should be used to represent the entire area? Or should a new and unique name be developed? The answer is that all options have pros and cons. And all options have been used. From a branding and marketing perspective the least functional of these options is a hyphenation of the current names of communities. This results in long, unwieldy, unpronounceable and non-intuitive place names."*

## 2.7 Arahan Pengembangan Aktivitas Ekonomi

### 2.7.1 Pengembangan Wilayah

Menurut Alkadri et al (1999) Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan. Di sisi sosial ekonomis, pengembangan wilayah adalah upaya memberikan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain secara ekologis pengembangan wilayah juga bertujan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagai akibat dari campur tangan manusia terhadap lingkungan. Pinchemel (1985) menambahkan bahwa alasan mengapa diperlukan upaya pengembangan wilayah pada suatu daerah tertentu, biasanya terkait dengan masalah ketidakseimbangan demografi, tingginya biaya atau ongkos produksi, penurunan taraf hidup masyarakat, ketertinggalan pembangunan, atau adanya kebutuhan yang sangat mendesak.

Pengembangan bisa diartikan sebagai suatu proses menumbuhkan, menambah, meningkatkan, memperbaiki atau memperluas. Konsep pengembangan wilayah Indonesia lahir dari suatu proses *iterative* yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis.

Menurut Sandy (1992) Pengembangan wilayah adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial wilayah tersebut

serta mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan menurut Hadjisaroso (1994) Pengembangan wilayah merupakan suatu tindakan mengembangkan wilayah atau membangun daerah atau kawasan dalam rangka usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyrakat, atau ada memajukan dan memperbaiki serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada Jayadinata (1999)

Pengembangan wilayah mempunyai dua makna yaitu wilayah yang objektif dan wilayah subjektif Ananta (1992). Wilayah objektif adalah suatu wilayah yang oleh perencana dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan, sedangkan wilaya subjektif adalah perwilayahan yang dibentuk atas dugaan suatu cara mengenal masalah. Dengan demikian pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai peningkatan aktivitas terhadap unsur-unsur dalam wilayah yang mencakup institusi, ekonomi, sosoal, dan ekologi dalam upaya meningkatkan tingkat dan kualitas hidup masyarakat.

### 2.7.2 Sektor Unggulan

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Menurut Susantono (2009) penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan.

Sambodo dalam Harisman 2007; menambahkan bahwa sektor unggulan adalah sektor yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor anugerah *(endowment factors).* Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah, diantaranya : *pertama*, sektor unggulan tersebut memiliki laju pertumbuhan yang tinggi; *kedua,* sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar; *ketiga*, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang; *keempat*, dapat juga diartikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Persoalan pokok dalam pembangunan daerah sering terletak pada sumberadaya dan potensi yang dimiliki guna menciptakan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada kerjasama Pemerintah dan masyrakat untuk dapat mengindentifikasi potensi-potensi yang tersedia dalam daerah dan diperlukan sebagai kekuatan untuk pembangunan perekonomian wilayah.

Dalam pengembangan wilayah/daerah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor yang potensi berkembangnya cukup besar, atau biasa disebut sebagai sektor unggulan. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi sektor potensial tersebut. Perkembangan ekonomi suatu wilayah membangun suatu aktivitas perekonomian yang mampu tumbuh dengan pesat dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor lain sehingga membentuk *forward linkage* dan *backward linkage.* Pertumbuhan yang cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya secara tidak langsung sektor perekonomian lainnya akan mengalami perkembangan.

Menurut Amabardi dan Socia (2002) kriteria daerah lebih ditekankan pada komoditas unggulan yang bisa menjadi motor penggerak pembanguan suatu daerah, diantaranya :

(1) Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya komoditas unggulan dapat memberikan kontrsibusi yang sangat signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran
(2) Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya
(3) Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar Internasional baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek lainnya,
(4) Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku.
(5) Komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui invasi teknologi, Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkulitas, secara optimal, sesuai dengan skala produksinya,
(6) Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan. Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penuruanan komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya,
(7) Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak ekstenal dan internal,

(8) Pengembangan komoditas unggulan harus mendaptkan berbagai dukungan, misalkan dukungan keamanan, sosial budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disentif, dan lain-lain

(9) Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Jadi pengembangan suatu sektor unggulan dapat menciptakan peluang bagi berkembanganya sektor lain yang terkait baik sebagai input bagi sektor unggulan maupun sebagai imbas dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor unggulan yang mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini yang memungkinkan pengembangan sektor unggulan dilakukan sebagai langkah dalam pengembangan perekonomian wilayah dan pengembangan wilayah.